

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE  
DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN  
WALENRANG  
(STUDI PADA DESA BARAMAMASE, DESA LALONG DAN DESA  
BATUSITANDUK)**

Tika pawindu<sup>1</sup>, Antong<sup>2</sup>, Saharuddin<sup>3</sup>

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo  
Jalan Jendral Sudirman Km.03 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo  
Sulawawesi Selatan 91922  
tpawindu@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the effect of accountability, transparency, effectiveness, and efficiency on village governance in Walenrang District. The population and sample of this research are villages located in Walenrang District. Purposive sampling was used as the sampling technique. The samples in this study were three villages, namely Baramamase Village, Lalong Village, and Batusitanduk Village. The method used in data collection is using a questionnaire, and this questionnaire uses a Likert scale. Data analysis used multiple regression analysis, tested using Statistical Packages For Social Science (SPSS). The results show that accountability has a positive effect on Village Governance, transparency has a negative impact on Village Governance, and Effective and Efficient has a negative impact on Village Governance.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Effective and Efficient, Village Governance.*

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penengaruh akuntabilitas, transparansi, dan efektif dan efisien terhadap tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Walenrang. Populasi dan sampel penelitian ini adalah desa yang berada di Kecamatan Walenrang. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini ada 3 desa yaitu Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan kuesioner ini menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda yang di uji menggunakan *Statistical Packages For Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa, transparansi berpengaruh negatif terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa dan Efektif dan Efisien berpengaruh negatif terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Transparansi, Efektif dan Efisien, tata kelola Pemerintahan Desa.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana semua masyarakat yang ada di Negara ini memiliki kebebasan yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah standar hidup mereka menjadi lebih baik. Indonesia juga menganut sistem demokrasi dimana sistem demokrasi dapat berupa sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan atau diurus oleh pemerintah Indonesia harus mempunyai dampak yang signifikan, agar siap memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia (Salmadian, 2018).

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan desentralisasi. Sistem desentralisasi juga merupakan sistem yang pemerintahannya dijalankan oleh masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi menekankan bahwa setiap pemerintah daerah di Indonesia mengelola pemerintahan dan mengelola keuangan daerahnya sendiri, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat (Christo, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perekonomian di Indonesia, kebijakan yaitu *good government governance* atau disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good governance* adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam mengelola pembangunan selama pemerintahan yang baik.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perubahan, sehingga masyarakat dapat berkembang di suatu negara. Pemerintah harus mampu mendorong terjadinya suatu peristiwa melalui kebijakan, program, proyek dan sebagainya (Priskila, 2020)

*Good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola yang baik menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan keputusan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis. Tata pemerintahan yang baik bertumpuh pada suatu gagasan yang mengacu pada metode pencapaian keputusan dan pelaksanaannya akandipertanggungjawabkan secara

bersama-sama. Sebagai consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Herdiwinoto, 2017).

Dalam penyelenggaraan *good governance* terdapat beberapaprinsip – prinsip yaitu : *pertama* Partisipasi masyarakat adalah setiap masyarakat berhak memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, *kedua* Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku untuk semua masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk penegakan hukum yang mengacu pada hak asasi manusia, *ketiiga* Transparansi adalah setiap informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dipahami, diakses dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, *keempat* Daya tangkap adalah institusi dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha dan melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi, *kelima* Berorientasi consensus adalah untuk melayani kepentingan yang berbeda sehingga membuat konsekuensi yang komprehensif tentang apa yang terbaik bagi masyarakat mengenai kebijakan dan prosedur, *keenam* Berkeadilan adalah setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya, *ketujuh* Efektivitas dan efesinsi adalah semua proses lembaga dan pemerintah harus dapat menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efesinsi kerja, *kedelapan* Akuntabilitas adalah semua pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, *kesembilan* Bervisi starategi adalah para pemimpin harus memiliki prospek yang luas dan berpandangan jauh ke depan megenai pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, pemimpin bahkan harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk memahami perkembangan tersebut dan harus memiliki pemahaman tentang kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, *kesepluluh* Saling berkaitan adalah seluruh prinsip *good governance* yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri (Herdiawanto, 2019).

Dari kesepuluh prinsip yang di jelaskan di atas, ada tiga prinsip utama yang mendasari indikator dalam implementasi tata pemerintahan yang baik di pemerintahan di antaranya yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi dan Efektivitas. Indikator - indikator ini harus diterapkan dengan benar demi mencapai *good governance* (Saparniene dan Valukonyte 2012). Ketiga indikator itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik di desa yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga sangat penting dalam mewujudkan *good governance*. Asas pemerintahan yang prima juga berperan sebagai pengontrol bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bebas dari tindakan korupsi. Juga digunakan sebagai penilaian kinerja pemerintah desa di Kecamatan Walenrang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menguasai desa dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki ciri-ciri yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Sementara itu, desa adat atau disebut dengan nama lain, memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa pada umumnya.

Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemberian tanggung jawab yang besar tidak dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan desa masih jauh dari harapan (Weny, Tome, 2017).

Hal ini terlihat dari kurangnya kedisiplinan aparat desa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya pemberian otonomi desa telah menciptakan kantong-kantong baru korupsi di lingkungan Negara. Fakta ini terlihat dari penangkapan enam kepala Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyalagunaan dana desa pada tahun 2015. Dari keseluruhan anggaran mulai dari Rp250 juta – Rp300 juta per desa, sekitar 30 persennya di salah gunakan (Kompas, 2016).

Walenrang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Walenrang terdapat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Walenrang merupakan kecamatan yang unik (bersama dengan 5 kecamatan lainnya yaitu Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur) karena ibukota kabupaten terletak

diantara kota/kabupaten lain, jarak antara ibukota kabupaten dan kecamatan ini kabupaten ini agak jauh, yaitu sekitar 100 Km dan harus melewati 1 kota lain untuk menempuhnya dan ditempuh dalam waktu 2 jam. Di Kecamatan Walenrang terdapat 9 desa/kelurahan yaitu : Desa Barammase (Bara Mamase), Desa Batusitanduk, Kelurahan Bulu, Desa Harapan, Desa Kalibamase, Desa Lalong, Desa Saragi, Desa Tombang dan Walenrang (Wikipedia, 2020).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi untuk organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009 dalam Wahida, 2016) dan organisasi nirlaba lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010). dalam Wahida, (2010). 2016) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi untuk organisasi sektor publik telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan data untuk koneksi antara pelayan dan prinsipal. Akuntansi karena penggerak transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti oleh perluasan spesialisasi di bidang akuntansi dan oleh karena itu berkembangnya organisasi sektor publik. Dengan berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (pemasok modal/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih mampu dan siap. Hubungan kontraktual antara stewards dan prinsipal pada gagasan kepercayaan (amanah = kepercayaan), bertindak secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang dapat diterima dalam kasus organisasi sektor publik adalah teori *stewardship*.

Teori *stewardship* selama penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan Pemerintah Desa sebagai lembaga yang akan dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan mengakhiri tugas dan fungsinya secara tepat, menjadikan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, manajemen (steward) mengarahkan seluruh kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal sehingga dapat menyediakan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

#### **Good governance**

*Good governance* di Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. *Good governance* berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu *good and governance* dimana *good* berarti nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebutuhan rakyat,

kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan *governance* memiliki arti semua mekanisme, proses, dan institusi dimana warga Negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan memenuhi perbedaannya (Prameswari, 2020)

*Work Bank* mendefinisikan tata kelola yang baik karena pelaksanaan manajemen atau manajemen yang solid dan akuntabel dalam pemerintahan dan didukung prinsip-prinsip pasar yang efisien juga karena penjegahan korupsi baik secara administratif maupun politik. Ini dalam sektor pemerintah atau sektor swasta merupakan inofasi mutlak atau tindakan dalam upaya untuk membentuk kredibilitas manajerial publik yang handal. *Good governance* hadir sebagai berbagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di suatu Negara. Tata kelola yang baik membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, dan oleh karena itu masyarakat untuk mewujudkan konsensus yang khas, di mana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan karena program-program yang ditetapkan didukung oleh keputusan bersama (Handayani dan Nur, 2019).

*Good governance* adalah terselenggaranya manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, menghindari salah alokasi aset, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola yang baik menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis. Tata kelola yang baik didasarkan pada konsep bahwa strategi untuk mencapai keputusan dan implementasinya di pertanggungjawabkan bersama. Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan juga swasta untuk penyelenggaraan negara selama bernegara (Herdiwinoto, 2017).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan pemerintahan karena proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan ketersediaan barang dan jasa publik. LAN juga menekankan bahwa dari aspek fungsional, pemerintahan sering dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan tujuan yang digariskan atau sebaliknya. Dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif antara domain negara, swasta, dan masyarakat (Pratama, 2020).

*Good governance* adalah tindakan atau perilaku yang didukung oleh nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi isu-isu publik untuk menilai nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan standar hidup. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa

*good governance* tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat sipil yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga melibatkan sektor swasta. Jadi, istilah *good governance* tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga kepada publik akhir dan pihak pribadi di luar birokrasi yang terus menerus menuntut terselenggaranya *good governance* di dalam Negara (Prameswari, 2020).

#### **Tujuan good governance**

Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk mewujudkan kondisi pemerintahan, siap melindungi kepentingan pelayanan publik secara seimbang, para pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat seperti negara, masyarakat sipil dan sektor swasta. Munculnya istilah *good governance* ini tentunya juga diindikasikan sehingga akan terjadi perubahan yang luas dalam pemerintahan. Pemerintah tidak harus melakukan semuanya sendiri tetapi hanya sebagai penyedia fasilitas dan koordinat. Pelaksanaan *government* atau *good governance* pada hakikatnya membagi peran, hal ini dapat dilakukan agar tidak terjadi monopoli. Pihak-pihak yang terlibat dalam *good governance* adalah pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Adanya *good governance* diharapkan mampu menyeimbangkan peran masing-masing pihak yang terlibat agar seimbang dan searah, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien serta bertanggung jawab (Hardiansyah, 2011).

Tata kelola yang baik dapat diwujudkan melalui upaya sinergi antara masyarakat sipil, sektor publik umum, dan oleh karena itu sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tata pemerintahan yang baik minimal harus siap untuk mewujudkan keinginan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan (Handayani dan Nur, 2019).

#### **Prinsip-prinsip good governance**

Prinsip - prinsip penyelenggaraan *good governance*, yaitu: *pertama* Partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, *kedua* Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak asasi manusia, *ketiga* Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dimengerti, diakses dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, *keempat* Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi, *kelima* Berorientasi konsensus adalah menjabatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi

masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur, *keenam* Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka, *ketujuh* Efektivitas dan efisiensi adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja, *kedelapan* Akuntabilitas adalah seluruh pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, *kesembilan* Bervisi starategi adalah para pemimpin harus memiliki prospektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut dan *kesepuluh* Saling berkaitan adalah seluruh prinsip *good governance* yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri (Herdiawanto, 2019).

#### **Tata kelola pemerintahan desa**

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 tentang Desa yang berbunyi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan negara dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23 perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintahan desa adalah: kepala desa atau disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai komponen pemerintahan desa yang terdiri atas: unsur pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa ( aparatur) terdiri atas: sekretariat desa, pimpinan daerah/kepala dusun dan pelaksana teknis/kepala seksi.

Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil yang secara langsung melayani keinginan masyarakat. Saat ini desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Karena ADD desa dituntut untuk bisa menghasilkan pendapatan mandiri melalui unit usaha desa yang bernama BUMDesa. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan bahkan harus diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dengan sistem kontemporer. Dengan pengelolaan yang baik, konflik antara masyarakat dan pemerintah dapat dihindari (Arsik dan Lawelai, 2020).

Dengan demikian desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan suatu desa, bagaimana bisa dikatakan bahwa dalam suatu

negara yang sangat makmur jika desa belum sejahtera, kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi tolak ukur yang nyata. Untuk menentukan besarnya kesejahteraan suatu desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang paling baru menimbulkan respon yang beragam dari banyak elemen, hal mendasar yang dibahas adalah pembagian/pembagian kekuasaan dari tingkat menengah ke tingkat desa, hal lain yang dibahas adalah adanya dana APBN kesepuluh yang akan dikucurkan oleh pemerintah. Untuk setiap desa, jika melihat APBN Indonesia saat ini, setiap desa akan menerima cukup 1 miliar, saya tidak berpikir bahwa ini dapat memberikan angin segar bagi pemerintah desa, namun yang juga kontroversial adalah adanya dana yang begitu besar. Di dalam desa dikhawatirkan akan muncul aktor-aktor korupsi di tingkat desa jika pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks pembuat kebijakan publik yang diwujudkan melalui regulasi, peran aktif dan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan negara dipahami sebagai bentuk inisiatif untuk mengorganisir diri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup. . dan kehidupan mereka. Dengan berlakunya UU Desa dan juga UU Pemerintahan Daerah, akan terlihat bentuk dan praktik peran aktif dan partisipasi warga Desa, antara lain: Penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan, Pengawasan warga terhadap pelayanan publik. praktik, pelibatan warga dalam memantau anggaran pembangunan dan mengkampanyekan terciptanya sistem pemerintahan yang transparan. dan dipersalahkan untuk kepentingan warga negara. Pada tataran implementasi, partisipasi dan partisipasi warga tercermin dalam pembangunan pedesaan. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (desa) demikian pula karena kualitas hidup manusia apalagi sebagai pengentasan kemiskinan dialokasikan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana potensi ekonomi lokal, terutama berkat pembangunan yang berkelanjutan. penggunaan sumber daya alam dan juga lingkungan.

#### **Hipotesis**

Hipotesis memberikan pernyataan tentang hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang akan diuji secara empiris, hipotesis ini menjadi dugaan sementara dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1:Prinsip Transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa.

H2:Prinsip Akuntabilitas mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa.

H3:Prinsip Efektif dan Efisien mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dapat berupa pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang dikaitkan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang didukung data yang ada dan dipadukan dengan analisis atau deskripsi situasi atau kejadian yang ada.

### **Lokasi dan waktu peneliti**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2019) Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah desa yang ada di kecamatan Walenrang sebanyak 9 desa.

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah komponen jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian adalah unsur populasi yang diambil sebagai sumber pengetahuan dan dapat mewakili populasi secara utuh. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Walenrang yang menjadi sampel sebanyak 3 desa dengan responden sebanyak 48. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:

1. Desa yang telah berdiri selama 5 tahun
2. Desa yang melaporkan laporan keuangannya setiap tahun
3. Desa yang memiliki kinerja terbaik yang mendapatkan tambahan dana desa, diantaranya pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Untuk menguji kebenaran penulisan ini, maka sumber data yang dipergunakan penulis yaitu Data

primer, data yang diperoleh langsung dari responden di Kantor desa yang ada di Kecamatan Walenrang. Data ini merupakan respon tertulis aparat desa yang berhubungan dengan Kantor desa yang ada di Kecamatan Walenrang yang menjadi sampel penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan kuesioner langsung, dimana kuesioner ini diantar langsung kepada responden kantor Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk.

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Ada 4 variabel pada penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, dan tata kelola pemerintahan desa.

Menurut Sugiyono (2019) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

### **Variabel Independen (X)**

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen sering disebut juga sebagai variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.

### **Variabel Dependen (Y)**

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tata kelola pemerintahan desa.

### **Instrumen penelitian**

Instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kuisisioner, yaitu teknik struktur untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis atau variabel yang dijawab responden. Kuisisioner dalam penelitian ini dibuat melalui pertanyaan - pertanyaan sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

**Tabel 3.1** Alternatif penilaian responden dengan skala likert

1 = Sangat tidak setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (ST)

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Uji validitas dapat berupa uji yang digunakan untuk mengukur validitas suatu angket, suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam angket tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang mungkin diukur oleh angket tersebut. Selama penelitian ini, uji validitas akan didistribusikan menggunakan korelasi Pearson, yaitu dengan menghitung korelasi antara nilai-nilai yang diperoleh dari berbagai pertanyaan, jika Sig.(2-tailed) yang mungkin bernilai di bawah 0,05 menyiratkan bahwa data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2009).

### Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas mampu menunjukkan konsistensi dari data-data yang telah dikumpulkan, suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban dari pertanyaan seseorang konsisten dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009), uji reliabilitas ini hanya akan dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya. Cara mengukur reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *cara one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan setelah itu hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria dari pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* > 0,60 Nunnally, 1960 dalam (Ghozali, 2009).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas data

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Sebagaimana dipahami, bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai sisa mengikuti distribusi tradisional. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik tidak valid, terutama untuk sampel berdimensi kecil. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi standar atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah metode yang paling mudah tetapi sering menyesatkan, terutama untuk ukuran sampel yang sangat kecil. Suatu model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang mewakili data tertentu mengikuti garis diagonal.

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat berupa berbagai pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Multikolinieritas terjadi ketika ada hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi sangat

terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

### Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka teori, teknik analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Selama penelitian ini, analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dan efisiensi terhadap pemerintahan desa. menggunakan analisis regresi berganda.

#### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu pendekatan yang biasa digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel (Y) dan satu atau lebih variabel bebas (X). Hubungan matematis digunakan sebagai model regresi yang digunakan untuk memprediksi atau memprediksi nilai (Y) didukung nilai tertentu (X). Dengan analisis multivariat akan diketahui variabel bebas mana yang benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kuantitas variabel dan jugavariabel signifikan yang sering digunakan untuk memprediksi nilai kuantitas variabel. Hubungan matematis akan dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = tata kelolah Pemerintahan Desa

a = konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub> = koefisien regresi

X<sub>1</sub> = transparansi

X<sub>2</sub> = akuntabilitas

X<sub>3</sub> = efektif dan efisien

e = standar Error

#### Uji Hipotesis

##### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah seberapa jauh kemampuan model untuk memperjelas variasi variabel dependen, nilai R<sup>2</sup> yang mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan mayoritas pengetahuan yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel bebas (Ghozali, 2005).

##### Uji Parsial (t)

Uji t (uji parsial) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi setiap variabel eksperimen terhadap variabel kuantitas. Pengujian hipotesis parsial statistik parametrik dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. untuk menghitung nilai t tabel ditetapkan dengan taraf mayor lima puluh dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu: p-value < 0,05, maka Ha ditolak (Sugiono 2011).

##### Uji Simultan (F)

Uji F simultan bertujuan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan

dalam model memiliki pengaruh bersama terhadap kuantitas variabel. Uji statistik F sering kali dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap kuantitas variabel yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05(Ghozali, 2005).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Kecamatan Walenrang bisa menjadi satu kecamatan yang unik bersama dengan 5 kecamatan lainnya, yaitu Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Dikarenakan induk ibu kotaKabupatennya berada diantara kota/kabupaten yang lain, jarak antara ibu kota Kabupaten dengan Kecamatan ini cukup jauh yaitu yaitu sekitar 100 km dan harus melalui 1 kota lain untuk menempuhnya dan mungkin ditempuh dalam waktu 2 jam. Di Kecamatan Walenrang terdapat 9 desa yaitu Desa Baramamase, Desa Batusitanduk, Desa Bulu, Desa Harapan, Desa Kalibamamase, Desa Lalong, Desa Saragi, Desa Tombang dan Walenrang.

Data yang telah diolah menggunakan metode purposive sampling seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. mendukung standar pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, terdapat 9 desa di wilayah kecamatan Walenrang, namun pada penelitian ini 6 desa tereliminasi yang tidak memenuhi faktor yaitu Desa Harapan, Desa Kalibamamase, DesaSaragi, Tombang Desa, Desa Bulu dan Desa Walenrang. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 3 desa yang memenuhi standar yaitu Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk.

### Deskriptif Statistik

#### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Setelah mendapatkan data dari kuisisioner, untuk mengecek valid atau tidaknya kuisisioner dilakukan uji validitas. selama penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu pengetahuan yang diterapkan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Standar yang digunakan untuk mengukur keabsahan data ini adalah:

1. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan drajat kebebasan (df) adalah  $n - 2$ , maka item kuisisioner tersebut valid.
2. Sebaliknya, jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  dengan df adalah  $n - 2$ , maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Hasil  $r_{hitung}$  dari 5 pertanyaan (X1), 5 pertanyaan (X2), 5 Pertanyaan (X3) dan 5 pertanyaan (Y) sehingga dalam kuisisioner penelitian pada variable independen yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Efektif dan Efisien (X3) dan variable dependen yaitu Tata kelola

Pemerintahan Desa. Variable tersebut dinyatakan valid apabila memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{table}$ . Df dihitung dengan  $df = 48 - 2 = 46$ . Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Sehingga,  $r_{tabel} = r(46; 0,05) = 0,291$ . Hal tersebut dapat dilihat pada penyajian validitas setiap variabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	$r_{hitung}$	$r_{table}$	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,685	0,291	Valid
	X1.2	0,508	0,291	Valid
	X1.3	0,295	0,291	Valid
	X1.4	0,344	0,291	Valid
	X1.5	0,459	0,291	Valid
Transparansi	X2.1	0,677	0,291	Valid
	X2.2	0,807	0,291	Valid
	X2.3	0,818	0,291	Valid
	X2.4	0,816	0,291	Valid
	X2.5	0,387	0,291	Valid
Efektif dan Efisien	X3.1	0,684	0,291	Valid
	X3.2	0,750	0,291	Valid
	X3.3	0,763	0,291	Valid
	X3.4	0,804	0,291	Valid
	X3.5	0,459	0,291	Valid
Tata kelola Pemerintahan Desa	Y1	0,635	0,291	Valid
	Y2	0,803	0,291	Valid
	Y3	0,741	0,291	Valid
	Y4	0,722	0,291	Valid
	Y5	0,491	0,291	Valid

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan valid, karena  $Corrected\ Item\ Correlation >$  dari  $r_{table}$  pada signifikansi 0,05 (5%).

#### Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variable. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari

waktu ke waktu. Nilai ketetapan untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk dapat dinyatakan reliabel jika *Cronbach Alpha*  $> 0,6$ .

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,775	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,637	0,60	Reliabel
Efektif dan Efisien (X3)	0,764	0,60	Reliabel
Tata kelola Pemerintahan Desa	0,760	0,60	Reliabel

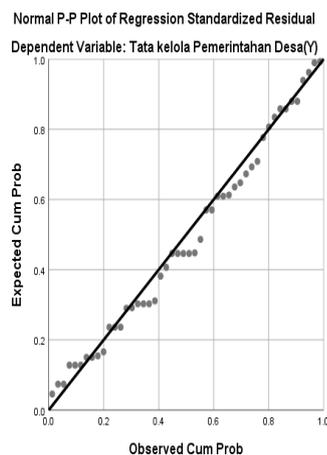
Sumber data: Lampiran 4, diolah (2021)

Dari table 4.2 di atas menunjukkan bahwa seluruh variable yang digunakan dalam penelitian tersebut telah reliabel karena secara keseluruhan variable ini memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$  sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrument dalam kuesioner penelitian ini.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Syarat dari uji normalitas yaitu model regresi harus terdistribusi normal.

**Gambar 4.1**  
**Grafik Plot Uji Normalitas**



Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

Pada gambar 4.1 menunjukkan hasil uji normalitas pada grafik normal *p-plot*. Pada gambar grafik normal *p-plot*, bahwa titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonalnya. Sehingga, grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan grafik uji normalitas dalam penelitian ini, juga menggunakan uji statistik kolmogorov smirnov, berikut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini:

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08052438
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.058
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

Hasil uji kolmogorov menunjukkan nilainya sebesar 0,096 dan nilai signifikan sebesar 0,200. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikan harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji normalitas sebelumnya.

**Uji Multikolonieritas**

Uji *Multikolonieritas* memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel dependen. Model regresi dikatakan baik jika model regresi tersebut tidak adanya korelasi di antara variabel independennya. Jadi jika mengetahui hal tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.829	4.288		3.225	.002		
Akuntabilitas (X1)	.466	.152	.520	3.072	.004	.601	1.663

Transparansi(X2)	-.113	.227	-.075	-.496	.622	.762	1.312
Efektif dan Efisien(X3)	-.005	.179	-.005	-.027	.979	.548	1.825

a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa (Y)

Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

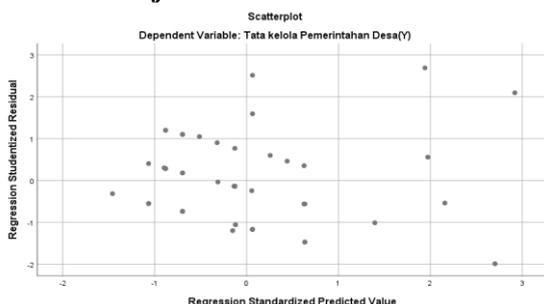
Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah <1,000. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel akuntabilitas sebesar 0,601, variabel transparansi sebesar 0,762, dan variabel efektif dan efisien sebesar 0,548. Sehingga, nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus <1,000.

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas sebesar 1,663 transparansi sebesar 1,312 dan untuk efektif dan efisien sebesar 1,825. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolonieritas* ini bahwa nilai dari VIF harus > 0,1. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala *multikolonieritas* antar variabel independen dalam penelitian ini.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas:

**Gambar 4.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

Dari hasil uji yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya titik-titik yang tersebar secara acak pada sumbu Y dan diatas maupun dibawah angka 0.

#### Analisis Data

##### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efektif dan efisien terhadap variabel dependen yaitu tata kelola Pemerintahan Desa. Adapun hasil uji analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.829	4.288		3.225	.002		
	Akuntabilitas (X1)	.466	.152	.520	3.072	.004	.601	1.663
	Transparansi (X2)	-.113	.227	-.075	-.496	.622	.762	1.312
	Efektif dan Efisien(X3)	-.005	.179	-.005	-.027	.979	.548	1.825

a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel hasil analisis regresi berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X1 (akuntabilitas) sebesar 0,466, koefisien variabel bebas X2 (transparansi) sebesar 0,113, dan koefisien variabel bebas X3 (efektif dan efisien) adalah sebesar 0,005. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 - b_3X_3 + e$$

$$Y = 13,829 + 0,466X_1 - 0,113X_2 - 0,005X_3 + e$$

- Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas sebesar 13,829 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang sebesar 13,829 satuan.
- Nilai koefisien ( $b_1$ ) Sebesar 0,466 menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) adalah positif, artinya setiap peningkatan variabel akuntabilitas sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,466 satuan.

- c. Nilai koefisien ( $b_2$ ) Sebesar 0,113 menunjukkan bahwa pengaruh transparansi (X2) terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) adalah negatif, artinya setiap peningkatan variabel transparansi sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami penurunan sebesar 0,267 satuan.
- d. Nilai koefisien ( $b_3$ ) Sebesar 0,005 menunjukkan bahwa pengaruh efektif dan efisien (X3) terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) adalah negatif, artinya setiap peningkatan variabel efektif dan efisien sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami penurunan sebesar 0,005 satuan.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.6**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493 <sup>a</sup>	.243	.191	1.11675
a. Predictors: (Constant), Efektif dan Efisien(X3), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)				
b. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)				

Sumber data: Lampiran 7, diolah (2021)

Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, besarnya adjusted R2 adalah 0,191 atau sebesar 19,1%. Hal tersebut berarti variasi tata kelola Pemerintahan Desa dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebesar 19,1%. Sedangkan sisanya yang sebanyak 80,9% (100 % - 19,1% = 80,9%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model dan/atau di luar variabel dalam.

#### Uji Parsial (t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

- Jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau t hitung  $> t$  tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- Jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau t hitung  $< t$  tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

**Tabel 4.7**  
Uji Parsial (t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
1					

	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.829	4.288		3.225	.002		
Akuntabilitas(X1)	.466	.152	.520	3.072	.004	.601	1.663
Transparansi (X2)	-.113	.227	-.075	-.496	.622	.762	1.312
Efektif dan Efisien (X3)	-.005	.179	-.005	-.027	.979	.548	1.825
a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)							

Sumber data: Lampiran 7, diolah (2021)

Dari hasil pengujian uji t di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

Pengujian hipotesis pertama (H1): Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar  $0,004 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,072 > t$  tabel 2,0153, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dimana variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis kedua (H2): Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar  $0,622 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,496 < t$  tabel 2,0153, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dimana variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis ketiga (H3): Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar  $0,979 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,027 > t$  tabel 2,0153, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak dimana Variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

#### Hasil Uji Simultan (F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) dari output Anova yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai sig  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Artinya bahwa akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan efektif dan efisiensi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa (Y).
- Jika nilai sig  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa secara akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan efektif dan efisiensi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa (Y).

**Tabel 4.8**  
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	17.605	2	5.868	4.705	.004 <sup>b</sup>

Residual	54.874	44	1.247		
Total	72.479	47			
a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)					
b. Predictors: (Constant), Efektif dan Efisien(X3), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)					

Sumber data: Lampiran 7, diolah (2021)

Pengujian hipotesis keempat (H4): Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk X1, X2 dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y yaitu sebesar  $0,004 < 0,05$  dan nilai F hitung  $4,750 > 2,81$  ( F tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dimana terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y.

## Pembahasan dan Diskusi hasil penelitian

### Pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) di kecamatan Walenrang. Hal ini dapat dilihat pada table 4.7 yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,004 atau dibawah tingkat signifikan 0,05 sehingga dengan begitu hipotesis pertama (H1) diterima dimana tingkat akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dapat menciptakan kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan yang disalurkan oleh instansi pemerintah desa lebih berpihak pada kepentingan umum. setiap kebijakan dalam pemerintahan desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa di lingkungan kecamatan Walenrang. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan kepercayaan dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan undang-undang juga akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang layak dan bebas korupsi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa selalu menyesuaikan diri dengan prosedur, undang-undang, dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory* yang dapat menjelaskan eksistensi Pemerintahan Desa sebagai suatu badan usaha yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan mengakhiri tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, menjadikan tanggung jawab keuangan yang dipercayakan

kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tercapai secara optimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, manajemen (steward) mengarahkan seluruh kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal sehingga dapat memberikan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yaitu: *pertama* penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti (2019) yang menunjukkan bahwa hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga menyatakan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa, *kedua* Penelitian yang dilakukan oleh Hutepea dan Aysa (2017) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik dan telah dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Adiankoting dilihat dari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan kepada camat setiap triwulan dalam setahun, ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arsik dan Lawelai (2020) menyatakan bahwa penelitian analitik tentang akuntabilitas menemukan bahwa desa Banabungi telah akuntabel dalam kebijakan keuangan. Hal ini dapat diperkuat melalui sosialisasi penyusunan laporan pertanggungjawaban dan juga penetapan kebijakan desa untuk membentuk desa tertib administrasi agar mempertimbangkan keuangan dan kebijakan yang diambil dan juga mewakili masalah masyarakat dan *keempat* Dungga, Tome dan Moha (2017) prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya suda dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa se Kecamatan Telaga Jaya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriandy (2018) dan Priskila (2020) menyatakan bahwa belum sepenuhnya prinsip akuntabilitas di lakukan oleh Pemerintah Desa Salumakki, pemerintah merasa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, Pemerintah masih belum memenuhi kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

### Pengaruh transparansi terhadap tata kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola

Pemerintahan Desa (Y) di kecamatan Walenrang. Hal ini dapat dilihat pada table 4.7 yang menunjukkan hasil tidak signifikan sebesar 0,622 atau diatas tingkat signifikan 0,05 sehingga dengan begitu hipotesis kedua (H2) ditolak dimana tingkat transparansi tidak berpegaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prinsip transparansi tidak berpegaruh terhadap tata kelola Pemerintahan desa akan tetapi telah menjalankan transparansi tetapi tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah desa di Kecamatan Walenrang. Karena pemerintah tidak menyampaik informasi secara terbuka mengenai laporan realisasi kepada masyarakat, namun pemerintah menyediakan papan informasi mengenai laporan keuangan maupun non keuangan, seperti papan baleho atau spanduk. Pemerintah juga akan memberikan akses kepada publik akhir untuk mencari tahu laporan kesimpulan dan juga laporan pertanggungjawaban. Untuk mengakses laporan, masyarakat hanya bisa langsung mengakses kantor desa. Hal ini sering terjadi karena sistem pemerintahan desa di Kecamatan Walenrang belum menggunakan sistem web, sehingga masyarakat hanya bisa mengakses langsung di kantor desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priskila, 2020) yang menyatakan bahwa dari analisis ini, Prinsip Transparansi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Salumakki, namun belum sepenuhnya, karena pemerintah. tidak menyampaikan informasi tentang laporan kesimpulan kembali ke masyarakat umum, tetapi pemerintah. akan memberikan akses kepada publik secara keseluruhan untuk mengetahui laporan kesimpulan dan juga laporan pertanggungjawaban. Untuk mengakses laporan, masyarakat hanya bisa mengakses langsung di kantor desa. Hal ini sering terjadi karena sistem pemerintahan Desa Salumakki belum menggunakan sistem web, sehingga masyarakat hanya bisa mengaksesnya langsung di kantor desa.

Namun penelitian ini belum sejalan dengan penelitian yang dilaukan Ardiyanti (2019) Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Penelitian tentang transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam melaksanakan transparansi ini, pemerintah. juga memberikan informasi penting. terkait keuangan dan non keuangan yang ditempel di

papan pengumuman desa atau di papan baleho atau spanduk. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsik dan Lawelai (2020). Dari hasil wawancara yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Selatan sudah jelas memberikan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa. hal ini sering disimpulkan karena dalam wawancara dan interaksi dengan aparat Desa Banabungi, pada umumnya semua terbuka dalam menyampaikan segala persoalan yang ada dalam lingkup Desa Banabungi.

### **Pengaruh efektif dan efesien terhadap tata kelola Pemerintahan Desa**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable efektif dan efesien (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) di kecamatan Walenrang. Hal ini dapat dilihat pada table 4.7 yang menunjukkan hasil tidak signifikan sebesar 0,979 atau diatas tingkat signifikan 0,05 sehingga dengan begitu hipotesis kedua (H3) ditolak dimana tingkat efektif dan efesien tidak berpegaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prinsip efektif dan efesien tidak berpegaruh secara negatif terhadap tata kelola Pemerintahan desa, akan tetapi telah menjalankan prinsip efektif dan efesien cukup baik, pemerintah desa di kecamatan walenrang telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat seperti kependudukan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai akuntabilitas, transparansi dan efektif dan efesien terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.
- b. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, sehingga hipotesis kedua dinyatakan ditolak.
- c. Efektif dan Efesien secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, sehingga hipotesis ketiganya dinyatakan ditolak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran, antara lain:

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan

- sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
- b. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa di tambahkan dengan menggunakan wawancara atau interview. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal. Serta peneliti selanjutnya diarpakan menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi tata kelola Pemerintahan Desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anas heriyanto. (2015). Penerapan prinsip-prinsip *good governaonce* dalam tata kelola pemerintahan desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Ardiyanti, R. (2019). Pegaaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa woro.kec.Kragan. kab.Kragan Rembang. *Skripsi. Universitas islam negeri Walisongo Semarang*.
- Arsik dan Lawelai. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintahan Desa Banabungi. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Christo. (2018). Analisis penerapan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa parit baru. kec.sungai raya. kab.kabu raya). *Skripsi. Universitas Sanata Dharma.Yogyakarta*.
- Ghozali. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (IV). UNDIP. <https://teorionline.wordpress.com/ghozali-imam-aplikasi-analisis-multivariate-dengan-program-spss-cetakan-ke-iv-semarang-badan-penerbit-undip/>. diakses pada tanggal 28 Maret 2021.
- Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Ketiga). Unniversitas Diponegoro.
- Handayani dan Nur. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik konaep, Dimensi, indikator dan implementasi*. (Gava Media (ed.)).
- Herdiawanto. (2019). *Kewarganegaran dan Masyarakat Madani* (pertama). Prenada media.
- Herdiwinoto.(2017). Pengertian Good governance. <https://hardiwinoto.com/good-government-governance/>. diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Hutapea, H. D., & Aysa. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance ( Studi Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara ). *Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, 6(1), 137–148.
- Ikhsan W R. (2017). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa ( Studi Desa Pesse. Kecamatan Donri-Donri. Kabupaten Soppeng ). *Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar*.
- Kompas. (2016). Enam Kepala Desa jadi tersangka. <https://regional.kompas.com/read/Enam.Kepala.Desajadi.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Dana.Desajadi>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Prameswari. (2020). Good governance Devenisi dan prinsipnya. <https://www.kompas.com/skola/read/good-governance-definisi-dan-prinsipnya>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Pratama. (2020). Analisis Prinsip Good governance dalam pengelolaan Desa studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru*.
- Priskila. (2020). Analisis penerapan good government governance dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Salumakki. Kec. Kalumpang. Kab. Mamuju). *Skripsi Universitas Kristen Indonesia Paulus.Makassar*.
- Saparniene dan Valukonyte (2012). Implementation of good governance principles in local self-government: the case of siauliai city. *Socialiniai tyrimai*, (3). 98-112.
- Salmadian. (2018). Pengertian Demokrasi. <https://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Sugiyono.2019. *Matode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2015. Alokasi Dana Desa
- Weny, Tome, dan M. (2017). penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di kecamatan telaga jaya kabupaten gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Wikipedia. (2020). Walenrang. Luwu. [https://id.wikipedia.org/wiki/Walenrang\\_Luwu](https://id.wikipedia.org/wiki/Walenrang_Luwu). Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.